

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat besar dalam mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor, termasuk di pemerintahan. Menurut *United Nations e-Government Survey* yang disusun oleh *Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA), e-Government dipahami sebagai inovasi yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, mendorong partisipasi, dan mengelola tata kelola pemerintahan melalui interaksi internal maupun eksternal yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet (UNDESA, dalam Nugroho & Purbokusumo, 2020). Implementasi e-Government tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dan pelaku usaha (G2B), antarinstansi pemerintah (G2G), serta pemerintah dan pegawainya (G2E), tetapi juga untuk memperbarui dan memodernisasi peran pemerintah itu sendiri (Pundenswari dkk., 2021)

Indonesia sebagai negara berkembang turut mengikuti arah transformasi digital ini melalui kebijakan reformasi birokrasi digital. Dalam kerangka tersebut, pemerintah berupaya menerapkan prinsip *good governance* melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian nasional. Penerapan teknologi digital di lingkungan birokrasi Indonesia memunculkan perubahan signifikan pada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja aparatur secara *real time*. Inovasi digital tersebut turut memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah karena proses kehadiran, pengawasan, hingga pelaporan dapat diakses secara terbuka. Dengan demikian, digitalisasi birokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi penanda kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi penting menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan (Smeru, 2024).

Dalam konteks tersebut, banyak pemerintah daerah di Indonesia mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem presensi berbasis aplikasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan ASN terhadap waktu kerja dan tata tertib kedinasan. Sebelumnya, proses kepegawaian seperti pengelolaan absensi menggunakan fingerprint, lalu pengajuan cuti, penilaian kinerja, dan pembayaran tunjangan menggunakan proses manual yang memakan waktu, dan penyimpanan arsip dalam *filing cabinet* yang rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Model manual ini tidak hanya rawan terhadap *human error* dan inefisiensi, tetapi juga membuka peluang terjadinya praktik yang tidak akuntabel, seperti manipulasi data kehadiran serta keterlambatan dalam penyebaran informasi (Ekowati & Nuryanto, 2022).

Dalam menyikapi tantangan dan peluang era digital, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mengembangkan sebuah aplikasi presensi mobile serta layanan kepegawaian berbasis Android dan iOS untuk memantau kinerja setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi. Aplikasi ini kemudian dikenal dengan nama *K-Mob*. Lahirnya kebijakan *K-Mob* ini lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya aparatur, antara lain pelaksanaan tugas yang belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi dan beban kerja, penempatan jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi yang dimiliki, penilaian kinerja yang belum dilakukan secara objektif, serta masih rendahnya tingkat disiplin pegawai. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan belum berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga berdampak pada pelayanan publik yang kurang optimal (Novitasari dkk., 2024)

Sebagai langkah awal mengatasi persoalan tersebut sekaligus memulai digitalisasi kepegawaian, pada 21 Januari 2019, aplikasi *K-Mob* resmi dilegalisasi melalui Surat Edaran Nomor: 060/03/BKD tentang Aplikasi Kinerja Mobil. Regulasi ini mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penyesuaian dalam

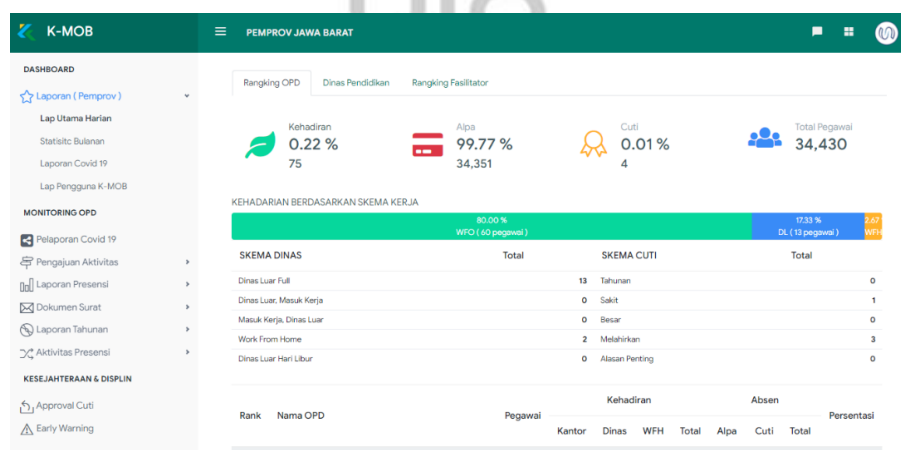
pelaporan kinerja. Melalui *K-Mob*, ASN dapat dengan mudah mencatat kehadiran dan menyelesaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pribadi langsung melalui smartphone mereka. Integrasi kedua fungsi tersebut mendorong terciptanya mekanisme kerja yang lebih praktis, di mana capaian kinerja individu dapat terpantau secara langsung dan berkontribusi terhadap capaian kinerja instansi secara menyeluruh (bkd.jabarprov.go.id, 2019).

Penggunaan aplikasi ini kemudian diperkuat secara hukum melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan kinerja ASN yang lebih efektif melalui sistem manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pegawai secara terukur dan terintegrasi. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya kedisiplinan serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kepegawaian guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja PNS dan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan (Provjabar, 2022)

Pada tahap awal penerapannya, aplikasi ini masih memiliki keterbatasan teknis, salah satunya karena sistem hanya mendukung perangkat Android. Seiring meningkatnya kebutuhan pengguna dan tuntutan terhadap sistem presensi yang lebih reliabel, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat melakukan serangkaian evaluasi dan pengembangan. Upaya tersebut kemudian menghasilkan pembaruan besar pada September 2022 melalui peluncuran *K-Mob* versi 5.0.0. Versi terbaru ini menghadirkan sejumlah fitur yang dirancang untuk memperkuat validitas dan akurasi data kehadiran, antara lain teknologi *face recognition* untuk memastikan autentikasi kehadiran pegawai, *tracking* GPS untuk memverifikasi lokasi kehadiran, ketersediaan aplikasi pada sistem operasi iOS, mekanisme *setting validation* yang dapat dilakukan langsung oleh atasan, serta penambahan fitur *Dynamic Working Arrangement* (pola kerja

dinamis). Pengembangan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kehadiran, sekaligus mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya dalam proses absensi pegawai (Novitasari, 2024).

Sebagai gambaran awal mengenai penerapan *K-Mob* Jabar, pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan bahwa dari total 36.005 pegawai, sebanyak 90,36% telah tercatat hadir melalui aplikasi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem presensi digital mampu merekap kehadiran secara cepat, akurat, dan dalam cakupan yang luas. Kemampuan *K-Mob* Jabar dalam menyajikan data kehadiran secara *real time* menegaskan bahwa aplikasi ini tidak sekadar merupakan inovasi administratif, tetapi juga instrumen yang efektif untuk memantau kedisiplinan pegawai secara lebih objektif. Data tersebut sekaligus memperkuat landasan akademik bahwa evaluasi terhadap efektivitas penggunaan *K-Mob* Jabar penting dilakukan, terutama ketika aplikasinya mulai diterapkan di lingkungan pendidikan seperti SMAN 1 Nagreg yang memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan kehadiran ASN (Bappeda Jabar, 2019).



Gambar 1. 1 Platform *K-Mob* Jawa Barat

Sumber : (Website *K-Mob* - *Jabarprov*)

Berdasarkan gambar 1.1 fungsi utama aplikasi *K-Mob* Jabar yang paling mendasar dan sering digunakan adalah presensi online, yang

memungkinkan ASN untuk melakukan absensi secara *real time* dimanapun mereka bertugas menggunakan perangkat mobile. Selain itu, aplikasi ini umumnya juga dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung lainnya seperti pengajuan cuti, perjalanan dinas, akses informasi kepegawaian, pengelolaan tugas, dan pemantauan kinerja. Dengan demikian, *K-Mob* Jabar tidak hanya dimaksudkan untuk mengawal disiplin kerja, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih terdigitalisasi, terstruktur, dan transparan bagi seluruh ASN (Evi Sulistiawati dkk., 2024).

Transformasi digital di lingkungan pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan dengan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur. Salah satu masalah yang paling umum adalah kinerja aplikasi yang tidak optimal, yang ditandai sering mengalami lag (kelambatan respons), error (kegagalan sistem), atau crash (tutup secara paksa). Hal ini sering bersumber dari keterbatasan infrastruktur, seperti kapasitas server yang tidak memadai untuk melayani jumlah pengguna secara bersamaan, koneksi internet yang tidak stabil dan lambat, serta ketidakcocokan (incompatibility) sistem baru dengan perangkat keras atau perangkat lunak warisan (legacy system) yang sudah usang. Ketidakstabilan teknis ini menciptakan ketidakandalan yang menggerogoti fondasi kepercayaan pengguna terhadap sistem (Pratama dkm k., 2024)

Perpindahan menuju sistem digital tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala non-teknis yang bersumber dari faktor manusia dan organisasi. Banyak ASN, terutama dari generasi yang tidak lahir bersama teknologi digital, menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Tidak hanya soal kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi digital juga menghadapi tantangan dari sisi integritas dan kejujuran pengguna. Disampaikan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada saat melakukan sosialisasi pengenalan fitur baru pada *K-Mob* di channel YouTube BKD Provinsi Jawa Barat, bahwa kecurangan yang sering terjadi pada saat

diterapkan face detection yaitu terdapat pegawai yang mengirimkan foto bukan dirinya dan menitipkan smartphone kepada orang lain yang berada di kantor. Oleh karena itu, dikembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi dan memvalidasi wajah sebagai bentuk keamanan untuk menumbuhkan kesadaran diri pada pegawai. (BKD Provinsi Jawa Barat, 2022).

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, SMAN 1 Nagreg tidak terlepas dari kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan digital ini. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah ini, baik guru maupun tenaga kependidikan, diwajibkan untuk menggunakan aplikasi *K-Mob Jabar* sebagai alat presensi dan penilaian kinerja utama.

Tabel 1. 1 Pengguna Aplikasi *K-Mob* di SMAN 1 Nagreg

No	Jenis Pegawai	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Guru	PNS	30
2.	Guru	P3K	33
3.	Tenaga Kependidikan	PNS	1
4.	Tenaga Kependidikan	P3K	1
Total Seluruh ASN			65

Sumber : (Diolah Peneliti 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di SMAN 1 Nagreg sebanyak 65 orang. Seluruh ASN tersebut merupakan pengguna aktif sistem presensi digital *K-Mob Jabar* yang digunakan sebagai sarana utama pencatatan kehadiran. Dengan jumlah ASN yang seluruhnya bergantung pada satu sistem presensi, maka keandalan aplikasi menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan waktu dan akurasi pencatatan kehadiran.

Dalam pelaksanaannya, implementasi aplikasi *K-Mob* Jabar di SMAN 1 Nagreg justru diwarnai oleh berbagai kendala teknis yang menghambat. Aplikasi *K-Mob* Jabar, yang seharusnya menjadi simbol efisiensi, justru sering mengalami *lag* atau *error*. Gangguan ini paling kritis terjadi pada momen-momen yang bersifat *time-sensitive*, seperti pada saat jam masuk dan pulang kerja, persis ketika proses presensi online harus dilakukan. Ketidakandalan sistem ini berpotensi besar mengganggu proses presensi ASN yang berusaha untuk tepat waktu justru terkendala oleh aplikasi yang tidak responsif, gagal memuat, atau bahkan tertutup secara tiba-tiba. Ketidakstabilan sistem ini bahkan memunculkan masalah baru di mana beberapa ASN yang telah tiba di rumah harus kembali ke sekolah karena menyadari bahwa presensi pulang mereka yang telah dilakukan sebelum meninggalkan lingkungan sekolah tidak tersimpan di dalam sistem akibat lupa atau *error* aplikasi.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Gangguan Presensi Pada Aplikasi

No	Tanggal Kejadian	Jenis gangguan Aplikasi	Bentuk Kendala	Dampak terhadap Presensi ASN
1.	6 September 2025	Gangguan teknis (<i>error</i>)	Presensi pulang tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi pulang
2.	7 September 2025	Gangguan teknis (<i>error</i>)	Presensi masuk tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi masuk
3.	17 September 2025	Pembaruan Aplikasi (<i>Update Sistem</i>)	Beberapa fitur tidak dapat digunakan selama proses pembaruan	Proses presensi dan layanan kepegawaian tidak dapat dilakukan
4.	29 September 2025	Error Validasi Presensi	Sistem gagal memproses data presensi	ASN diminta mengabaikan

				presensi hari tersebut
5.	5 Oktober 2025	Gangguan Sinkronisasi Data	Data presensi tidak langsung masuk ke sistem	Presensi masuk tercatat terlambat
6.	12 Oktober 2025	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi tidak dapat dilakukan sampai pengumuman selanjutnya	ASN tidak dapat melakukan presensi
7.	26 Oktober 2025	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi pulang tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi pulang
1.	1 November 2025	Gangguan sistem (Migrasi server)	Aplikasi presensi tidak dapat diakses sementara waktu	ASN tidak dapat melakukan presensi masuk dan pulang
2.	3 November 2025	Ketidakjelasan informasi sistem	Belum ada informasi resmi dari BKD terkait presensi	ASN diminta mengabaikan presensi hari tersebut
3.	5 November 2025	Keterlambatan pembaruan data	Aplikasi mengalami keterlambatan <i>update</i> data presensi	Presensi masuk tercatat terlambat
4.	5 Desember 2025	Gangguan teknis (<i>error</i>)	Presensi pulang tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi pulang

5.	20 Desember 2025	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi gagal atau harus diulang	Potensi keterlambatan ASN
6.	13 Januari 2026	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi
7.	14 Januari 2026	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi pulang tidak dapat dilakukan sampai pengumuman selanjutnya	ASN tidak dapat melakukan presensi pulang
8.	5 Februari 2026	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi pulang tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi pulang
9.	6 Februari 2026	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi masuk tidak dapat dilakukan	ASN tidak dapat melakukan presensi masuk
10.	21 Februari 2026	Pembaruan Aplikasi (<i>Update Sistem</i>)	Aplikasi tidak digunakan selama proses pembaruan	Proses presensi dan layanan kepegawaian dan tidak dapat dilakukan presensi
11.	5 Mei 2026	Gangguan teknis (<i>error/lag</i>)	Presensi tidak dapat dilakukan dihari tersebut	ASN tidak dapat melakukan presensi masuk dan pulang
12.	13 Mei 2026	Terjadi kendala pada aplikasi K- Mob	Aplikasi keluar sendiri saat digunakan	ASN tidak dapat melakukan presensi pulang

14.	22 Mei 2026	Gangguan pada GPS/Lokasi	Lokasi pengguna tidak terdeteksi	Presensi tidak dapat dilakukan .
-----	----------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Sumber: (Diolah Peneliti dari Dokumentasi

WhatsApp Grup SMAN 1 Nagreg)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan gangguan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi *K-Mob* Jabar bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh pengguna di lingkungan SMAN 1 Nagreg. Gangguan tersebut tidak hanya dialami oleh individu tertentu, melainkan memengaruhi seluruh ASN, baik guru maupun tenaga kependidikan, sehingga presensi tidak dapat dilakukan secara normal pada waktu tertentu. Gangguan tersebut dengan bentuk kendala yang beragam, seperti gangguan sistem akibat migrasi server, keterlambatan pembaruan data presensi, serta tidak dapat dilakukannya presensi pada hari tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada ketepatan waktu pencatatan kehadiran ASN, sehingga pihak sekolah menerapkan kebijakan anulir presensi atau pemberian toleransi sebagai tindak lanjut. Temuan ini mengindikasikan bahwa keandalan sistem presensi digital *K-Mob* Jabar belum sepenuhnya stabil dan berpotensi memengaruhi efektivitas penerapannya dalam meningkatkan disiplin kerja ASN.

Implikasi dari kendala teknis yang berulang ini terhadap disiplin kerja ASN sangatlah serius. Jika seorang ASN sudah berusaha untuk disiplin tetapi dihadapkan pada kendala teknologi yang menghalangi, hal itu berpotensi menurunkan motivasi dan memunculkan pembenaran atas keterlambatan. Dengan demikian, ketidakstabilan aplikasi *K-Mob* Jabar tidak hanya menjadi masalah teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi hambatan operasional yang menggerogoti tujuan awal dari digitalisasi untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih efektif dan berintegritas (Purnakaryanto & Baehaki, 2022)

Penelitian ini berlandaskan lima dimensi, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Dalam konteks penggunaan aplikasi presensi online *K-Mob* Jabar di SMAN 1 Nagreg, pemahaman program mencerminkan sejauh mana ASN memahami

tujuan dan mekanisme penggunaan aplikasi tersebut sebagai alat untuk mendukung kedisiplinan kerja. Ketepatan sasaran terlihat dari kesesuaian penerapan aplikasi ini terhadap kelompok pengguna yang memang membutuhkan sistem presensi modern untuk memantau kehadiran secara objektif. Ketepatan waktu mencakup keandalan sistem dalam mencatat presensi secara *real time* tanpa keterlambatan, sehingga meminimalisir manipulasi data absensi. Pencapaian tujuan berkaitan dengan sejauh mana penerapan *K-Mob* Jabar berhasil meningkatkan kedisiplinan ASN dalam hal kehadiran dan ketepatan waktu bekerja. Sedangkan perubahan nyata tampak melalui peningkatan budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel setelah aplikasi diterapkan. Dengan demikian, lima dimensi efektivitas ini menjadi kerangka penting dalam menilai sejauh mana *K-Mob* Jabar efektif meningkatkan disiplin kerja ASN di SMAN 1 Nagreg.

Penelitian oleh Arya dan Yamasari 2025, yang mengevaluasi aplikasi absensi berbasis Android “Siapik Dapodik” menunjukkan bahwa sistem tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai karena aplikasi memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi serta dilengkapi dengan informasi batas waktu presensi yang berfungsi sebagai pengingat bagi pengguna untuk melakukan absensi tepat waktu. Sementara itu, penelitian serupa yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten (Aderizal & Syamsir, 2023) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi absensi online di OPD Kabupaten Dharmasraya tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai.

Penelitian mengenai implementasi aplikasi kepegawaian pemerintah daerah di sektor pendidikan memang telah dilakukan di beberapa sekolah, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti penerapan aplikasi tersebut di SMAN 1 Nagreg. Lebih lanjut, meskipun beberapa penelitian terdahulu menyinggung soal kendala, fokus analisisnya belum secara spesifik dan mendalam mengangkat dampak kritis dari kendala teknis berulang seperti *lag* dan *error* terhadap efektivitas aplikasi dan disiplin kerja. Hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk memahami

dinamika implementasinya di lingkungan sekolah dan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Melihat adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan presensi digital dan realitas implementasinya di satuan pendidikan, kajian ini menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Penerapan *K-Mob* Jabar di lingkungan sekolah tidak hanya melibatkan aspek teknis aplikasi, tetapi juga interaksi yang kompleks antara perilaku ASN, budaya organisasi, kesiapan infrastruktur, dan perubahan pola kerja yang dituntut oleh digitalisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem presensi berbasis teknologi beroperasi dalam konteks yang memiliki ritme kerja, karakteristik pengguna, dan tantangan teknis yang berbeda dari instansi pemerintah lainnya. Dengan menelaah dinamika tersebut secara sistematis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas sudut pandang mengenai efektivitas digitalisasi kepegawaian, khususnya pada sektor pendidikan yang selama ini belum banyak tersentuh dalam penelitian sebelumnya.

Melihat dinamika penerapan presensi digital yang di satu sisi menawarkan efisiensi, namun di sisi lain masih menyisakan berbagai kendala teknis dan perilaku pengguna, penelitian ini menarik untuk dikaji karena mampu mengungkap bagaimana efektivitas *K-Mob* Jabar benar-benar bekerja dalam konteks nyata di SMAN 1 Nagreg. Pada tataran teoritis, meskipun konsep efektivitas telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian, penerapan kerangka efektivitas yang komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno (2007) yang mencakup lima dimensi, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata belum sepenuhnya diintegrasikan dalam konteks evaluasi aplikasi *K-Mob*. Dengan demikian, penelitian berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Presensi Online *K-Mob* Jabar dalam Meningkatkan Disiplin Kerja ASN di SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung” diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam upaya mengoptimalkan penerapan teknologi kepegawaian di lingkungan pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai Efektivitas Program Aplikasi Presensi Online *K-Mob* Jabar dalam Meningkatkan Disiplin Kerja ASN di SMAN 1 Nagreg, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendala teknis pada aplikasi *K-Mob* Jabar, seperti error, lag, gangguan server, dan kegagalan sinkronisasi data yang dapat menghambat proses presensi ASN.
2. Keandalan sistem *K-Mob* Jabar dalam mendukung pencatatan presensi secara tepat waktu dan *real time* belum sepenuhnya optimal.
3. Meskipun aplikasi *K-Mob* Jabar telah digunakan oleh seluruh ASN di SMAN 1 Nagreg, tingkat pemahaman pengguna terhadap berbagai fitur dan mekanisme penggunaan aplikasi masih belum merata, terutama pegawai yang berusia lebih senior.
4. Belum diketahui secara mendalam sejauh mana penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar mampu mendukung terwujudnya tata kelola kepegawaian yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan SMAN 1 Nagreg.
5. Penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar ditujukan untuk meningkatkan disiplin kerja ASN melalui sistem presensi digital yang lebih tertib dan transparan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga tujuan program dalam membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan memberikan perubahan nyata terhadap perilaku kerja ASN belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman ASN di SMAN 1 Nagreg terhadap program dan mekanisme program aplikasi *K-Mob* Jabar?

2. Bagaimana aplikasi *K-Mob* Jabar telah tepat sasaran dalam menysasar seluruh ASN (guru dan tenaga kependidikan) di SMAN 1 Nagreg?
3. Bagaimana keandalan aplikasi *K-Mob* Jabar dalam hal ketepatan waktu pencatatan presensi di SMAN 1 Nagreg?
4. Bagaimana tujuan penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar untuk meningkatkan disiplin kerja ASN di SMAN 1 Nagreg telah tercapai?
5. Bagaimana Perubahan nyata seperti apa yang terlihat pada disiplin kerja ASN di SMAN 1 Nagreg setelah implementasi aplikasi *K-Mob* Jabar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari rumusan permasalahan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman ASN di SMAN 1 Nagreg terhadap program serta mekanisme program aplikasi *K-Mob* Jabar.
2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran implementasi aplikasi *K-Mob* Jabar dalam menjangkau seluruh ASN, baik guru maupun tenaga kependidikan di SMAN 1 Nagreg.
3. Untuk mengetahui keandalan aplikasi *K-Mob* Jabar dalam hal ketepatan waktu pencatatan presensi di SMAN 1 Nagreg.
4. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar dalam meningkatkan disiplin kerja ASN di SMAN 1 Nagreg.
5. Untuk mengetahui perubahan nyata pada disiplin kerja ASN di SMAN 1 Nagreg setelah penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang efektivitas program berbasis teknologi dalam bidang manajemen kepegawaian, khususnya di sektor pendidikan. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi sistem presensi digital sebagai instrumen pengawasan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan berlandaskan teori efektivitas program menurut Sutrisno

(2007) yang meliputi dimensi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta pencapaian tujuan, penelitian ini menguji sejauh mana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks penggunaan aplikasi *K-Mob* Jabar. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tentang hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kinerja aparatur publik, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai digitalisasi administrasi kepegawaian di lembaga pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak terkait. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat, temuan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar sekaligus menjadi dasar pengembangan fitur yang lebih mendukung peningkatan disiplin dan produktivitas ASN. Bagi pihak sekolah, khususnya SMAN 1 Nagreg, penelitian ini memberikan pemahaman empiris mengenai program presensi online terhadap perilaku disiplin pegawai, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan kehadiran serta penegakan aturan kedisiplinan yang lebih efisien dan objektif. Bagi ASN atau pegawai, hasil penelitian ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi presensi sebagai wujud profesionalitas dan akuntabilitas dalam bekerja. Sementara itu, bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau dasar untuk melakukan studi lanjutan mengenai efektivitas sistem presensi digital di berbagai instansi publik dengan pendekatan dan konteks yang lebih luas.

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai inovasi digital dalam pengelolaan kepegawaian, salah satunya melalui penggunaan aplikasi *K-Mob* Jabar sebagai sistem presensi dan layanan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan aplikasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan disiplin kerja ASN melalui pengelolaan kehadiran yang lebih efektif, transparan, dan

terintegrasi. Untuk memahami hubungan antara penerapan aplikasi *K-Mob* Jabar dengan disiplin kerja ASN, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

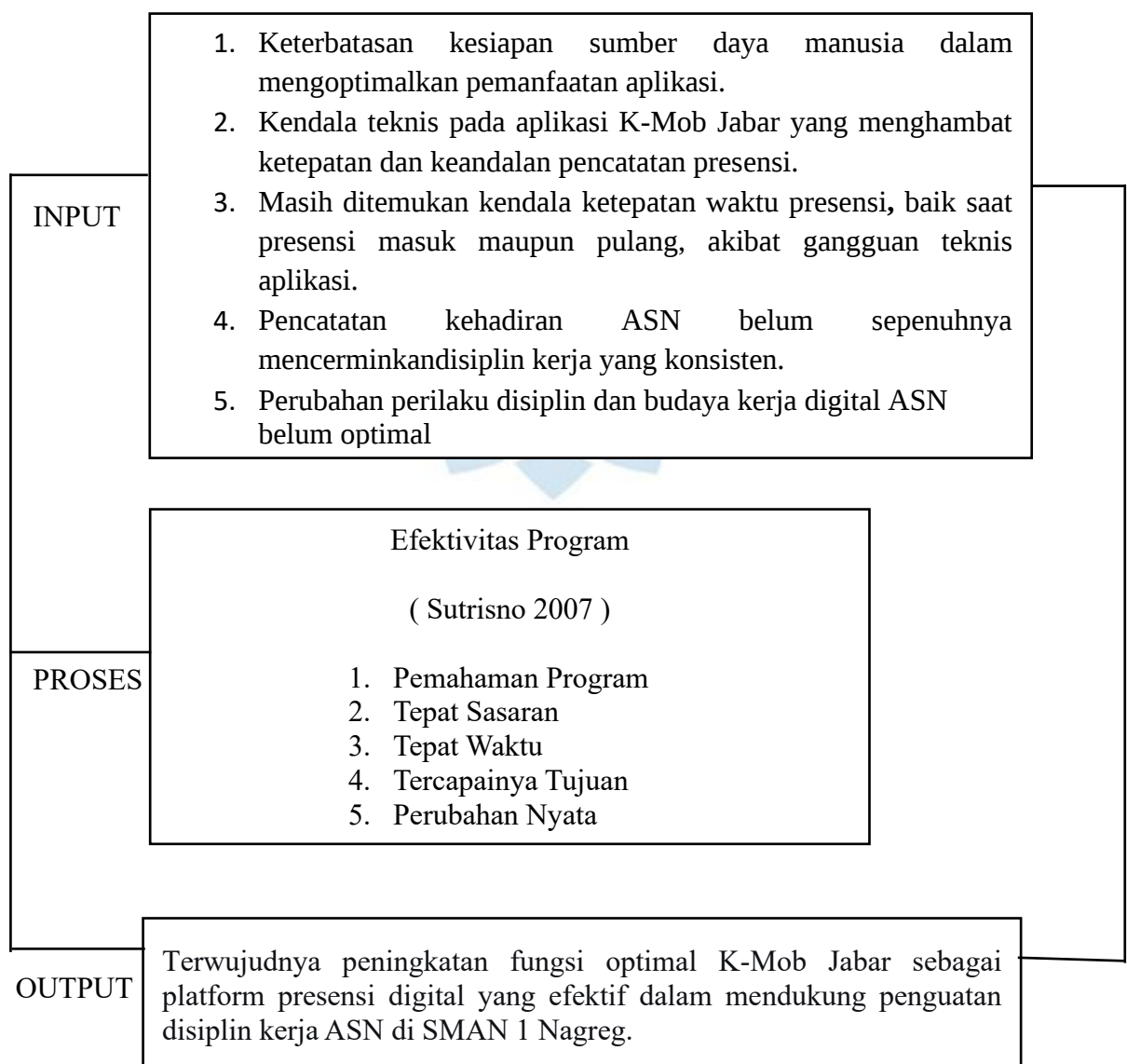
Menurut Sugiyono (2022) kerangka berpikir adalah struktur logis yang menghubungkan konsep atau variabel yang akan dikaji. Kerangka berpikir dibangun dari teori-teori yang relevan serta temuan penelitian terdahulu, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun hipotesis penelitian. Kerangka berpikir ini berperan penting dalam membantu penelitian tetap terarah pada tujuan pokoknya dan membantu peneliti dalam menganalisis data secara lebih terstruktur.

Berangkat dari prinsip tersebut, penelitian ini menyusun kerangka berpikir yang memetakan secara sistematis bagaimana teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007) digunakan sebagai lensa analitis dalam mengkaji implementasi aplikasi *K-Mob* Jabar di SMAN 1 Nagreg. Dalam konteks transformasi digital birokrasi, pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada adopsi teknologi dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan implementasi di lapangan. Hal ini relevan karena implementasi aplikasi *K-Mob* Jabar di lingkungan pendidikan, khususnya di SMAN 1 Nagreg, masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi awal data empiris, teridentifikasi masalah-masalah utama yang terkait dengan efektivitas aplikasi:

1. Aspek kualitas system yang ditunjukkan oleh ketidakstabilan aplikasi yang sering mengalami *lag*, *error*, dan *crash* pada momen-momen kritis seperti proses presensi
2. Dampak terhadap produktivitas dan efisiensi yang dilihat dari ketidakandalan sistem justru menciptakan inefisiensi baru dan menghambat produktivitas kerja ASN
3. Kemudahan sistem dan kemampuan beradaptasi pengguna mengalami masalah dalam menghadapi kendala teknis yang berulang

Untuk menganalisis kompleksitas permasalahan ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007). Kerangka ini dipilih karena kemampuannya tidak hanya untuk mendiagnosis kelemahan pada masing-masing dimensi efektivitas, tetapi juga untuk menganalisis dinamika dan keterkaitan antar kelima dimensi tersebut.



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: (Diolah Peneliti 2025)